

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Financial Inclusion* (Inklusif Keuangan)

a. Pengertian *Financial Inclusion*

Inklusi keuangan adalah penyediaan akses layanan keuangan kepada seluruh penduduk khususnya penduduk miskin dan penduduk terkecil lainnya.²¹ Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara nyaman, informatif, terjangkau biayannya dan tepat waktu, dengan tidak membeda-bedakan dan menjunjung penuh harkat dan martabatnya. Pelayanan itu diberikan kepada sebagian besar kelompok yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah.²²

World Bank menggambarkan inklusi keuangan sebagai kisaran, kualitas dan ketersediaan layanan keuangan untuk yang kurang terlayani dan tidak termasuk dalam keuangan.²³ Dalam *Global Financial Development Report 2014* World Bank juga menjelaskan bahwa *financial inclusion* adalah keadaan dimana sebagian besar masyarakat dapat memanfaatkan jasa keuangan yang tersedia serta memberikan edukasi

²¹ Peterson K. Ozili, *Impact of digital finance on financial inclusion and stability*. (Borsa Istanbul Review, 18 (4), 2018) 329-340.

²² Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, *Booklet Keuangan Inklusif*, ... 6.

²³ World Bank, *Financial Systems and Development: World Development Report*, (New York: Oxford University Press, 2012).

kepada kelompok masyarakat yang belum sadar akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang tinggi.²⁴

Beberapa peneliti seperti Jansen dan Hannig mengungkapkan inklusi keuangan merupakan upaya untuk memasukkan masyarakat yang belum mengenal perbankan ke dalam sistem keuangan formal sehingga memiliki kesempatan untuk menikmati jasa-jasa keuangan seperti tabungan, pembayaran, serta transfer.²⁵ Kemudian Sarma menyatakan bahwa Inklusi keuangan adalah proses untuk mendapatkan jaminan kemudahan akses, ketersediaan layanan dan dapat memperoleh manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat.²⁶

Menurut Dixit inklusi keuangan adalah pengiriman layanan keuangan, termasuk layanan perbankan dan kredit, dengan biaya yang terjangkau ke bagian besar kelompok yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah yang cenderung dikecualikan. Berbagai layanan keuangan termasuk akses ke tabungan, pinjaman, asuransi, pembayaran dan fasilitas pengiriman uang yang ditawarkan oleh sistem keuangan formal.²⁷

Inklusi keuangan telah menjadi tujuan kebijakan utama pemerintah di banyak negara berkembang dan Negara maju, dan terdapat kesempatan/kemungkinan besar bahwa inklusi keuangan akan membawa

²⁴ World Bank, *Global Financial Development Report 2014 : Financial Inclusion*. (Washington : International Bank for Reconstruction and Development, 2014), 15.

²⁵ Alfred Hanning dan Stefan Jansen, *Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues*, (Asian Development Bank Institute Working Paper, 2010).

²⁶ Mandira Sarma, *Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness*, (Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, No. 7, 2012), 3.

²⁷ Radhika Dixit, *Financial Inclusion For Inclusive Growth of India: A Study of Indian States*, (International Jurnal of Business Management Research, vol 3, 2013), 150.

penduduk yang dikucilkan/dikesampingkan ke sektor keuangan formal sehingga mereka dapat memiliki akses ke produk dan layanan keuangan formal.²⁸

Dari berbagai definisi di atas memiliki satu kesamaan yaitu menekankan bahwa setiap anggota masyarakat harus memiliki akses terhadap layanan keuangan yang tersedia. Terdapat tiga dimensi yang harus diperhatikan dalam *financial inclusion* yaitu aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan layanan sistem keuangan.

b. Teori *Financial Inclusion*

Teori *financial inclusion* menurut Peterson K. Ozili dijelaskan menjadi tiga bagian, yaitu teori penerima inklusi keuangan, teori penyampaian inklusi keuangan, dan teori pendanaan inklusi keuangan.²⁹

1) Teori Penerima Keuangan Inklusif

Selain perempuan dan orang miskin, ada penerima manfaat inklusi keuangan potensial lainnya yang sebagian besar telah diabaikan dalam literatur seperti orang muda, orang tua, orang yang dilembagakan dan sakit, orang cacat, dan orang yang sebelumnya pernah dikeluarkan dari sektor keuangan karena berbagai alasan seperti melakukan tindak pidana. Berikut adalah empat teori yang menjelaskan siapa yang diuntungkan dari keuangan inklusif.

²⁸ Franklin Allen, Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper and Maria Soledad Martinez Peria, *The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts* (Journal of Financial Intermediation, 27, 2016), 1-30.

²⁹ Peterson K. Ozili, *Theories of Financial Inclusion*. (Munich Personal RePEc Archive Paper, 2020) 1-23.

a) Teori barang public/umum tentang inklusi keuangan

Teori barang publik tentang inklusi keuangan berpendapat bahwa (i) penyampaian layanan keuangan formal kepada seluruh penduduk dan (ii) memastikan bahwa ada akses keuangan yang tidak terbatas untuk semua orang, harus diperlakukan sebagai barang publik untuk kepentingan semua anggota masyarakat. Sebagai barang publik, individu tidak dapat dikecualikan dari penggunaan layanan keuangan formal dan individu tidak dapat dikecualikan dari mendapatkan akses ke layanan keuangan. Semua individu bisa menikmati layanan keuangan dasar tanpa membayarnya. Akses kepada layanan keuangan oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaannya kepada orang lain yang berarti bahwa semua anggota populasi dapat dibawa ke sektor keuangan formal dan semua orang akan menjadi lebih makmur. Dalam teori ini, semua anggota populasi adalah penerima inklusi keuangan dan tidak ada yang tertinggal/dikecualikan.

b) Teori ketidakpuasan inklusi keuangan

Teori ketidakpuasan tentang inklusi keuangan berpendapat bahwa kegiatan dan program inklusi keuangan di suatu negara harus terlebih dahulu ditargetkan untuk semua individu yang sebelumnya terlibat dalam program sektor keuangan formal tetapi meninggalkan sektor keuangan formal karena mereka tidak puas dengan aturan keterlibatan di sektor keuangan formal, atau memiliki pengalaman

pribadi yang tidak menguntungkan dari berurusan dengan perusahaan dan agen di sektor keuangan formal.

c) Teori kelompok rentan inklusi keuangan

Teori kelompok rentan terhadap inklusi keuangan berpendapat bahwa kegiatan atau program inklusi keuangan di suatu negara harus ditujukan kepada anggota masyarakat yang rentan seperti orang miskin, muda, perempuan, dan orang lanjut usia yang paling menderita akibat kesulitan ekonomi dan krisis. Orang yang rentan seringkali yang paling terpengaruh oleh krisis keuangan dan resesi ekonomi, oleh karena itu, masuk akal untuk membawa orang-orang yang rentan ini ke sektor keuangan formal.

d) Teori sistem inklusi keuangan

Teori sistem inklusi keuangan menyatakan bahwa hasil inklusi keuangan dicapai melalui sub-sistem yang ada (baik sistem ekonomi, sosial atau keuangan) yang diandalkan oleh inklusi keuangan, dan sebagai hasilnya, inklusi keuangan yang lebih besar akan memiliki manfaat positif bagi sistem yang diandalkan itu. Perubahan signifikan pada sub-sistem (salah satu bagian dari sistem) dapat secara signifikan mempengaruhi hasil inklusi keuangan yang diharapkan, misalnya, pemberlakuan peraturan pada pelaku ekonomi dan penyedia jasa keuangan yang merupakan bagian dari sistem ekonomi dan keuangan dapat menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan pengguna layanan keuangan dasar yang

dapat memaksa agen ekonomi dan pemasok/penyedia jasa layanan keuangan untuk menawarkan layanan keuangan yang terjangkau dan berkualitas kepada pengguna dalam aturan yang ditetapkan yang melindungi pengguna layanan keuangan dari eksploitasi dan diskriminasi harga.

2) Teori Penyampaian Inklusi Keuangan

Harapan mengenai penyampaian inklusi keuangan memerlukan proses pemikiran yang mendasari untuk menetapkan mengapa agen ini diperlukan untuk memberikan inklusi keuangan; Oleh karena itu, dibutuhkan teori penyampaian keuangan inklusif. Beberapa teori atau perspektif penyampaian keuangan inklusif disajikan di bawah ini:

a) Teori tingkatan kekuasaan/eselon komunitas tentang keuangan inklusif

Teori tingkatan kekuasaan/eselon komunitas menyatakan bahwa inklusi keuangan harus disampaikan kepada populasi yang dikecualikan secara finansial melalui pemimpin mereka. Teori eselon komunitas berpendapat bahwa pemimpin komunitas berpengaruh di komunitasnya dan dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendorong atau membujuk anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam sektor keuangan formal. Komunitas mempunyai peran penting dalam membentuk nilai-nilai pemimpin dan anggotanya. Anggota masyarakat mempercayai pemimpin mereka dan percaya bahwa pemimpin mereka akan membuat

keputusan yang bermanfaat bagi mereka sementara pemimpin komunitas memastikan bahwa keputusan yang mereka buat mencerminkan nilai dan etos yang dianut oleh anggota komunitas. Tokoh masyarakat/pemimpin bisa berperan untuk membawa anggotanya ke sektor keuangan formal karena ikatan budaya yang kuat antara tokoh masyarakat dan anggota memungkinkan tokoh masyarakat untuk mendorong anggotanya untuk berpartisipasi di sektor keuangan formal. Jika tokoh masyarakat mengubah keyakinan dan kesukaannya untuk berpartisipasi dalam sektor keuangan formal, tokoh masyarakat dapat mendorong anggotanya untuk berpartisipasi dalam sektor keuangan formal. Karena hasil komunal sebagian besar bisa diprediksi oleh preferensi, kepercayaan, dan keistimewaan lain dari pemimpin komunitas, maka sangat masuk akal untuk memberikan inklusi keuangan kepada anggota komunitas melalui pemimpin komunal mereka.

b) Teori pelayanan publik tentang keuangan inklusif

Teori pelayanan publik tentang keuangan inklusif menyatakan bahwa keuangan inklusif merupakan tanggung jawab masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah kepada warganya, dan masyarakat mengharapkan pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan bagi warganya. Teori ini berpendapat bahwa inklusi keuangan harus disampaikan oleh pemerintah kepada semua warga negara termasuk populasi yang dikecualikan/terkucilkan secara

finansial melalui lembaga publik. Berdasarkan teori ini, hanya pemerintah yang berperan dalam mencapai inklusi keuangan yang membawa seluruh penduduk ke sektor keuangan formal sehingga setiap penduduk dapat memiliki akses ke produk dan layanan keuangan formal.

c) Teori agen khusus inklusi keuangan

Teori agen khusus tentang inklusi keuangan berpendapat bahwa penyampaian inklusi keuangan kepada populasi yang dikecualikan/terpencil dapat terhambat oleh masalah dan teknis yang kompleks yang berkaitan dengan sifat komunitas, orang-orangnya atau geografinya; oleh karena itu, diperlukan agen khusus untuk memberikan inklusi keuangan kepada anggota komunitas yang dikecualikan/terpencil. Berdasarkan teori ini, agen khusus diharapkan menjadi: (i) agen yang sangat terampil dan terspesialisasi, (ii) memahami kekhasan populasi yang dikecualikan, (iii) memahami sistem keuangan informal yang ada di masyarakat yang terkuculkan/terpencil tersebut tinggal, (iv) mengidentifikasi area untuk perbaikan melalui inovasi, dan (v) merancang cara untuk mengintegrasikan sistem keuangan lokal ke dalam sektor keuangan formal.

d) Teori intervensi kolaboratif inklusi keuangan

Teori intervensi kolaboratif menyatakan bahwa inklusi keuangan harus dicapai melalui intervensi kolaboratif dari berbagai pemangku

kepentingan. Teori tersebut menyarankan bahwa upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk membawa penduduk yang dikecualikan/terkucilkan ke dalam layanan keuangan formal.

e) Teori literasi keuangan tentang keuangan inklusif

Teori literasi keuangan tentang inklusi keuangan menyatakan bahwa inklusi keuangan harus dicapai melalui pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan warga negara. Teori ini berpendapat bahwa literasi keuangan akan meningkatkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi di sektor keuangan formal.

3) Teori Pendanaan Inklusi Keuangan

Berikut adalah beberapa teori pendanaan inklusi keuangan.

a) Teori uang swasta tentang inklusi keuangan

Teori keuangan swasta tentang keuangan inklusif menyatakan bahwa kegiatan keuangan inklusif harus didanai dengan menggunakan uang pihak swasta karena penyandang dana swasta akan membutuhkan pertanggungjawaban dari pengguna dana mereka, dan akan memastikan bahwa dana swasta digunakan secara efisien dan memastikan bahwa produk dan layanan keuangan dikirimkan kepada yang dimaksudkan sebagai anggota populasi yang dikecualikan/terkucilkan secara finansial.

b) Teori keuangan publik tentang keuangan inklusif

Teori keuangan publik tentang keuangan inklusif menyatakan bahwa program dan kegiatan keuangan inklusif harus didanai dengan menggunakan keuangan publik. Teori ini berpendapat bahwa program dan kegiatan keuangan inklusif harus didanai dari anggaran pemerintah. Ada pembuktian bahwa pendanaan publik untuk inklusi keuangan dapat tumbuh lebih cepat dari pendanaan swasta.

c) Teori pendanaan intervensi inklusi keuangan

Teori pendanaan intervensi inklusi keuangan berpendapat bahwa kegiatan dan program inklusi keuangan dapat didanai oleh intervensi khusus dari beragam penyandang dana terkait maupun yang tidak terkait daripada menggunakan uang pembayaran pajak. Teori ini berpendapat bahwa banyak 'penyandang dana khusus' yang ada di dunia seperti para dermawan, organisasi non-pemerintah dan pemerintah asing, dan pemberi dana khusus ini cenderung mendukung keuangan inklusif untuk populasi global.

c. Pengukuran *Financial Inclusion*

Menurut Sarma dalam sebuah teorinya *Index of Financial Inclusion*, untuk mengukur tingkat *financial inclusion* suatu negara/wilayah, yaitu dengan menggunakan pengukuran *index of financial inclusion* (IFI). Dalam pengukuran IFI, yang dilakukan terlebih dahulu adalah menghitung indeks

dimensi untuk masing-masing dimensi keuangan inklusif yaitu dimensi aksesibilitas, availibilitas dan penggunaan.³⁰

Dimensi pertama adalah dimensi aksesibilitas, dalam menghitung dimensi ini, yaitu dengan menggunakan indikator rasio jumlah dana pihak ketiga (DPK) perbankan per 1.000 penduduk dewasa, dapat dihitung dengan rumus:

$$D_1 = \frac{\sum DPK \text{ Perbankan}}{\sum \text{Penduduk Dewasa}} \times 1.000$$

Dimensi kedua adalah dimensi availibilitas, dalam menghitung dimensi availibilitas, yaitu dengan menggunakan indikator rasio jumlah kantor layanan perbankan per 100.000 penduduk dewasa, dapat dihitung dengan rumus:

$$D_2 = \frac{\sum \text{Kantor Layanan Perbankan}}{\sum \text{Penduduk Dewasa}} \times 100.000$$

Dimensi ketiga adalah dimensi penggunaan, dalam menghitung dimensi penggunaan, yaitu dengan menggunakan indikator rasio jumlah kredit/pembiayaan perbankan per nilai Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto suatu wilayah, dapat dihitung dengan rumus:

$$D_3 = \frac{\sum \text{Kredit/Pembiayaan Perbankan}}{\sum \text{Produk Domestik Bruto}} \times 1000$$

³⁰ Mandira Sarma, *Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness*: (Jerman: Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, 2012), 10.

Setelah mengetahui nilai dari masing-masing dimensi, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai indeks inklusi dari tiap dimensi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$d_i = w_i \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i}$$

dimana:

w_i = *weight attached* untuk dimensi i, $0 \leq w_i \leq 1$

A_i = nilai aktual dimensi i

m_i = batas terendah nilai dimensi i

M_i = batas tertinggi nilai dimensi i

Dijelaskan oleh Sarma bahwa *weight attached*/Bobot yang digunakan untuk seluruh dimensi adalah sama ($w_i = 1$). Hal ini mengasumsikan bahwa seluruh dimensi memiliki bobot yang sama.

Selanjutnya setelah mengetahui nilai dari masing-masing dimensi adalah menentukan nilai X_1 dan X_2 dengan menggunakan rumus di bawah ini:

$$X_1 = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}}$$

$$X_2 = 1 - \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + (w_3 - d_3)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}}$$

Langkah berikutnya adalah menentukan nilai IFI sebagai nilai rata-rata sederhana dari X_1 dan X_2 dengan rumus sebagai berikut:

$$IFI = \frac{1}{2} [X_1 + X_2]$$

$$IFI = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}} + \left(1 - \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + (w_3 - d_3)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}}\right) \right]$$

Rumus IFI didapatkan dengan menghitung rata-rata nilai X_1 dan X_2 yang merepresentasikan posisi antara titik paling buruk dan titik ideal. Hasil pengukuran IFI dibagi menjadi tiga kategori:

- 1) IFI rendah jika nilai IFI kurang dari atau sama dengan 0,3
- 2) IFI medium jika nilai IFI berada di antara lebih dari 0,3 dan kurang dari 0,6
- 3) IFI tinggi jika nilai IFI antara 0,6 sampai dengan 1.³¹

d. *Financial Inclusion* dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang tercipta karena hubungan vertikal dan horizontal. Ilmu ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, karena terbentuk tidak hanya karena adanya interaksi sesama manusia, tetapi juga karena hubungan vertikal dengan Allah SWT. Sehingga ada aturan-aturan agama yang harus ditaati. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari agama Islam.

Muhammad Sharif Chaudry menjelaskan beberapa tujuan ekonomi Islam:

- 1) Pencapaian Falah

Tujuan pertama dan paling utama islam adalah falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah sebabnya Al-Qur'an mengagumi mereka yang

³¹ *Ibid*,... 11-12.

berdo'a kepada tuhan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 201:

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (٢٠١)

Artinya: 201. Dan di antara mereka ada orang yang bendo'a: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". (QS. Al-Baqarah ayat 201)

32

Ekonomi Islam bertujuan mempelajari falah yang bisa dicapai dengan mengorganisir sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi. Falah adalah konsep kebaikan di dunia dan akhirat. Di dunia ini mewakili tiga hal: kelangsungan hidup, kebebasan dari keinginan, kekuasaan dan kehormatan. Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).³³

2) Distribusi Yang Adil dan Merata

Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang dan menghendaki berputar dan beredar diantara seluruh bagian di dalam masyarakat. Al-Qur'an menjelaskan bahwa kekayaan tidak boleh

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surakarta: Media Isnaini Publishing, 2008).

³³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta bekerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 2.

terkonsentrasi di tangan sedikit orang saja, melainkan harus dengan bebas beredar di antara semua orang sehingga kaum miskin juga dapat memperoleh manfaatnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

*Artinya: 7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr ayat 7)*³⁴

3) Tersedianya Kebutuhan Dasar

Mendapatkan kebutuhan hidup dasar minimal merupakan salah satu hak mendasar setiap manusia. Tuhan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar setiap makhluk. Sistem ekonomi Islam menjamin tersedianya

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ,,,.

kebutuhan dasar bagi setiap orang yang memerlukannya melalui sistem keamanan sosialnya yang komprehensif.³⁵

4) Tegaknya Keadilan Sosial

Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah tegaknya keadilan sosial ekonomi. Tetapi distribusi tidak selalu adil diantara umat manusia, sehingga orang-orang yang beruntung menjadi kaya sementara sebagian yang kurang beruntung menjadi amat miskin. Dalam rangka menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi adil dan merata, sistem ekonomi menetapkan sistem zakat dan sedekah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ , وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Artinya: 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".(QS. Al-Imran ayat 92)*³⁶

Prinsip-prinsip dasar ekonomi islam inilah yang menjadi landasan dibentuknya perbankan syariah. Prinsip-prinsip dasar ini menjadi acuan operasional perbankan syariah dan pada akhirnya menjadi acuan dalam mengimplementasikan *Financial Inclusion*. Adanya prinsip-prinsip dasar ini yang akan membedakan pengimplementasian *Financial Inclusion* pada

³⁵ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012), 33.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,...

bank konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah tidak hanya mengemban bisnis, tetapi juga misi sosial sebagaimana tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri.

2. Pembiayaan Perbankan Syariah

a. Perbankan Syariah

Bank adalah Lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman dan bentuk lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejak dikeluarkan UU No.7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 yaitu bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Kemudian, disahkan lagi UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan sampai sekarang menjadi payung hukum perbankan syariah nasional dimana bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usah Syariah. Perbankan adalah semua yang menyangkut tentang kelembagaan, menyangkut keuangan, kegiatan usaha serta aturan dan proses di dalam melakukan kegiatannya.

Ada tiga kegiatan utama yang dilakukan perbankan antara lain :³⁷

1) Mengumpulkan dana

Maksudnya adalah mengumpulkan dana yang beredar di masyarakat, dikelola untuk dikembalikan lagi untuk keperluan.

³⁷ Kasmir, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Edisi Keenam. PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 12.

2) Mengelola dana yang terkumpul untuk dikembalikan lagi ke masyarakat.

Maksudnya adalah dana yang telah dikumpulkan dan dikelola dikembalikan lagi ke masyarakat bisa berbagai macam bentuknya misalnya untuk bank konvensional bisa berupa pemberian pinjaman atau kredit apabila masyarakat membutuhkan, sedangkan pembiayaan adalah istilah yang ada di bank syariah. Kegiatan yang dilakukan oleh perbankan untuk menyalurkan dana ini disebut dengan istilah *lending*.

3) Memberikan jasa lainnya.

Selain mengumpulkan dana, mengelola dan mengembalikan lagi ke masyarakat perbankan juga mempunyai kegiatan yang lain misalnya bisa sebagai lembaga yang memberikan pembayaran kompensasi bisa berupa gaji, pensiun, tunjangan hari tua, ataupun hadiah. Melalui bank kita juga bisa melakukan berbagai macam pembayaran mulai dari membayar listrik, kartu kredit, sekolah, telepon, air, sampai membayar rumah. Bank juga bisa sebagai tempat penagihan/inkaso, pengiriman uang/transfer, penjualan mata uang asing/ valas, menyimpan dokumen (*save deposit box*) dan masih ada beberapa jasa lainnya yang bisa dilayani oleh bank.

Pada saat terjadi permasalahan pada bank konvensional serta krisis moneter, kehadiran bank syariah telah memberikan jalan keluar bagi pelaku bisnis. Menurut Muhammad, Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits;

sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.³⁸

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Meskipun secara sistem, perbankan syariah telah menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, sistem perbankan syariah sementara ini masih memberikan tingkat *return* yang lebih rendah kepada nasabah dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh perbankan konvensional. Peningkatan efisiensi operasional yang berdampak pada perbaikan tingkat return bermitra dengan bank syariah yang mana selain mengharapkan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah, juga tentunya mengharapkan tingkat return yang lebih baik. Hal ini perlu dicermati terutama dalam menghadapi era global dimana pesaing usaha bukan hanya datang dari industri sejenis, akan tetapi juga industri lainnya yang memiliki kemampuan untuk memberikan jasa sejenis.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Al-Hadis. Sedangkan

³⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 15.

pengertian "muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat (Abdul Wahaf Khallaf, 1980: 46). Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (ba'i), bunga (riba), piutang (goroah), gadai (rohan), memindahkan utang (hawalah), bagi untung dalam perdagangan (giro'ah), jaminan (dhomah), persekutuan (syirqoh), persewaan dan perburuhan (ijaroh).

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan.
- 2) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- 3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- 4) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.³⁹

³⁹ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves, 2007), 14.

Perbankan syariah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 UU Perbankan syariah, bertujuan “Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah). Selain itu tujuan bank syariah yaitu:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat Islam untuk bermuamalah secara Islam, khususnya bermuamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha lainnya yang mengandung unsur gharar (tipuan).
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- 3) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengatasi kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap.
- 4) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi.

5) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.⁴⁰

Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena sistem keuangan dan perbankan syariah adalah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut untuk secara sungguh- sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah.

b. Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Bank percaya kepada nasabah, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Nasabah mendapat kepercayaan dari bank, sehingga nasabah berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah di terimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah di perjanjikan dalam akad pembiayaan.⁴¹

Menurut veithzal dan arifin tujuan pembiayaan Secara makro adalah sebagai berikut:⁴²

⁴⁰Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta; Indonesia, Ekonisia, 2003), 5.

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2011), 105.

⁴² Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 681.

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan pembiayaan, pembiayaan berupa fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Jenis-jenis pembiayaan bank syariah yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dalam peningkatan produksi untuk Ayaan modal keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of placed* dari suatu barang. Dalam

bank syariah, pembiayaan modal kerja tidak hanya sebatas meminjamkan uang saja tetapi sekaligus menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

- 2) Pembiayaan investasi, diberikan pada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penanaman modal untuk mengadakan rehabilitas, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.
- 3) Pembiayaan konsumtif, pembiayaan ini diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pada umumnya kebutuhan konsumtif yang dibiayai adalah kebutuhan sekunder karena pembiayaan primer umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil.

Pembiayaan UMKM merupakan bagian dari pembiayaan modal kerja dan investasi, karena merupakan pembiayaan dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah. Menurut UU No.20 Tahun 2008 dan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/11/PBI/2011 Tanggal 3 Maret 2011 diatas disebutkan bahwa:

- 1) Kriteria usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang sesuai undang-undang. Usaha mikro memiliki asset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan paling besar Rp 300 juta.
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

dimiliki, dikuasai atau bukan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dalam undang-undang. Usaha kecil memiliki nilai asset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta, hingga maksimum 2,5 milyar.

- 3) Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria Usaha Menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp 50 milyar.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:⁴³

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
- 4) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 5) Kata lain dari pelaku usaha adalah wirausahawan (*entrepreneurship*). Secara sederhana, wirausahawan (*entrepreneurship*) dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang

tersebut, berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, UKM adalah rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara umum merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan pengertian UKM berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), UKM adalah sebuah usaha rakyat yang dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang.⁴⁴

Secara umum, ada banyak UKM dengan kriteria yang berbeda. Berikut ini beberapa di antaranya:

1) Manajemen Bisnis Sendiri

UKM sangat berbeda dengan waralaba. Perbedaannya yang mencolok terletak pada manajemen bisnis. Apabila waralaba memiliki manajemen bisnis yang ditentukan oleh pihak *franchisor*, maka UKM tidak. Pemilik UKM memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan sendiri dengan kemajuan usahanya.

2) Modal Usaha Terbatas

⁴⁴ Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*, (Yogyakarta, Laksana, 2014), 12.

UKM memiliki modal terbatas, karena pada umumnya modal hanya berasal dari pemilik usaha atau bisa jadi sekelompok kecil orang yang ikut menginvestasikan uangnya untuk modal UKM tersebut.

3) Karyawan Kebanyakan dari Penduduk Lokal

Pada umumnya, UKM mengambil karyawan dari penduduk lokal. Hal ini dikarenakan dua hal. *Pertama*, pemilik UKM ingin memberdayakan penduduk lokal agar bisa bekerja secara mandiri di daerah tersebut. *Kedua*, adanya keterbatasan biaya untuk menggaji karyawan yang berasal dari daerah luar

4) Bersifat Usaha Keluarga

Pada umumnya, UKM bersifat usaha keluarga. Dalam artian, usaha ini dijalankan dan dikembangkan sendiri oleh pemilik usaha bersama keluarganya. Setelah berkembang cukup besar, pemilik UKM memperkerjakan penduduk sekitar dengan sistem seperti keluarga.

5) Posisi Kunci Dipegang oleh Pemilik

Maju-mundurnya UKM tergantung sepenuhnya oleh pemilik usaha. Dalam hal ini, berarti sistem untuk menjalankan atau memajukan usaha tidak diajarkan kepada karyawan atau orang yang menjadi kepercayaan.

6) Modal Usaha Berasal dari Keuangan Keluarga

Kebanyakan UKM tidak mengandalkan modal dari pihak luar, seperti investor atau bank, tetapi dari keuangan keluarga, sehingga memungkinkan tercampurnya keuangan keluarga dan perusahaan. Modal

dari pihak luar hanya dibutuhkan ketika pemilik UKM ingin mengembangkan usaha tersebut ke luar daerah.

7) Menuntut Motivasi Tinggi

Untuk memajukan UKM, pemilik usaha dituntut untuk memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi tersebut meliputi motivasi untuk melakukan promosi secara besar-besaran, membuat situs bisnis, membuat strategi marketing *online* serta *offline*, dan sebagainya.

8) Menggunakan Teknologi Sederhana dalam Proses Produksi

Pada umumnya, UKM masih menggunakan teknologi sederhana dalam proses produksinya. Teknologi sederhana yang dimaksud disini adalah alat-alat yang masih tradisional dan belum canggih, sebagaimana yang ada belakangan ini.⁴⁵

Menurut Pandji Anoraga dalam bukunya menerangkan tentang karakteristik sektor usaha mikro yang antara lain:

- 1) Sistem pembukuan yang sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- 2) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- 3) Modal terbatas.
- 4) Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.

⁴⁵ Akifa P. Nayla, *Op.Cit*, hlm. 17.

- 5) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapakan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- 6) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- 7) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.⁴⁶

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang

⁴⁶ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010),. 32-33.

menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

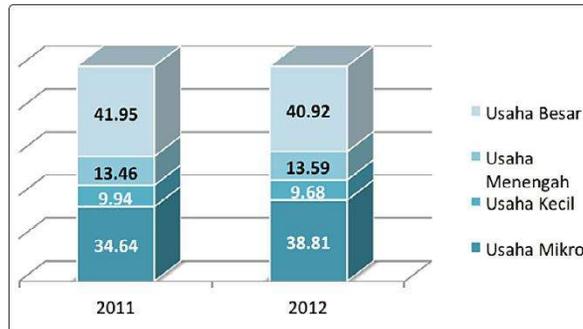
Menurut Tulus Tambunan pada bukunya yang berjudul *UMKM di Indonesia*. Beliau menyatakan bahwa UMKM mempunyai peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. UMKM sangat penting, sebab menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar. Kontribusi UMKM terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.⁴⁷

b. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi

⁴⁷ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Ghalia Indonesia;Bogor, 2009).

mengalami imbas krisis. Bisnis UMKM mampu menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 60% dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.⁴⁸



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM 2014

Gambar 2.1. Grafik Perkembangan Usaha Besar dan UMKM tahun 2011-2012

Berdasarkan Gambar 2.1. selama tahun 2011 sampai 2012 terjadi pertumbuhan pada UMKM serta penurunan pada usaha besar. Bila pada tahun 2011, usaha besar mencapai 41,95% tahun berikutnya hanya 40,92%, turun sekitar 1,03%. Pada UMKM terjadi sebaliknya. Bila usaha menengah pada tahun 2011 hanya 13,46%, pada tahun 2012 mencapai 13,59%. Ada peningkatan sebesar 0,13%. Berbeda dengan usaha kecil, ada sedikit penurunan dari tahun 2011. Pada tahun itu mencapai 9,94% namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9,68%, artinya menurun sekitar 0,26%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, bila tahun 2011 hanya mencapai 34,64%, pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81% terjadi peningkatan sebesar 4,17%.⁴⁹

⁴⁸ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia, 2015), 6.

⁴⁹ *Ibid*,... 7.



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM 2014

Gambar 2.2. Grafik Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2011

Jika ditinjau dari sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar sampai terkecil berdasarkan gambar grafik 2.2. di atas adalah sektor: 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (48,85%); 2. Perdagangan, Hotel dan Restoran (28,83%); 3. Pengangkutan dan Komunikasi (6,88%); 4. Industri Pengolahan (6,41%); 5. Jasa-jasa (4,52%); 6. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (2,37%); 7. Bangunan (1,57%); 8. Pertambangan dan Penggalian (0,53%); 9. Listrik, Gas dan Air Bersih (0,03%).⁵⁰

Berdasarkan perkembangan Produk Domestik Bruto Tahun 2010-2011, peluang untuk meningkatkan kapasitas usaha UMKM masih memiliki

⁵⁰ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*...hal. 11.

prospek cukup besar, terutama bagi sektor-sektor ekonomi UMKM yang menyumbang PDB dalam porsi besar.

Tabel 2.1. Produk Domestik Bruto Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2010 – 2011

Sektor Ekonomi		Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
		2010	2011	2010	2011
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	UMKM	962.048,2	1.010.335,8	292.111,6	310.886,7
	UB	41.973,3	48.773,2	12.294,6	16.919,6
Pertambangan dan pengalihan	UMKM	102.884,8	128.475,0	24.570,8	30.498,2
	UB	564.262,4	707.997,7	161.864,6	219.065,8
Industri Pengolahan	UMKM	567.205,0	786.297,3	186.449,2	191.551,9
	UB	1.129.124,0	1.412.848,8	408.863,9	375.541,4
Listrik, Gas dan Air Bersih	UMKM	3.779,2	6.714,3	1.351,2	2.691,6
	UB	47.624,4	40.906,5	16.696,5	28.977,0
Bangunan	UMKM	227.246,2	279.845,4	54.551,6	62.666,3
	UB	397.607,7	358.718,8	95.511,7	130.975,9
Perdagangan, Hotel dan Restoran	UMKM	845.414,7	1.147.600,7	384.575,1	361.705,8
	UB	30.634,3	39.319,2	16.025,9	29.408,7
Pengangkutan dan Komunikasi	UMKM	189.740,5	220.278,6	79.395,8	99.676,8
	UB	208.931,2	254.879,2	137.998,9	127.498,6
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	UMKM	288.028,2	329.605,0	139.982,1	161.436,5
	UB	170.413,4	239.145,9	80.663,9	73.021,9
Jasa-jasa	UMKM	280.046,5	394.419,5	119.584,5	148.212,2
	UB	11.798,8	20.925,3	5.455,1	6.374,9
PDB UMKM		3.466.393,3	4.303.571,5	1.282.571,8	1.369.326,0
PDB UB		2.602.369,5	3.123.514,6	935.375,2	1.007.784,0
PDB Nasional		6.068.762,8	7.427.086,1	2.217.947,0	2.377.110,0

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM 2014

Pada Tabel 2.1. di atas menunjukkan sumbangan UMKM terhadap PDB selama kurun waktu 2010 – 2011 terus mendominasi dibanding usaha besar. Lima sektor ekonomi yang memberikan sumbangan besar terhadap PDB adalah:

- 1) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 2) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Jasa-jasa
- 5) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Dari kelima sektor ekonomi tersebut, sumbangan terhadap PDB sektor industri pengolahan; perdagangan; hotel dan restoran; dan jasa-jasa cenderung mengalami kenaikan, sementara untuk pertanian dan jasa keuangan mengalami penurunan. Dengan demikian, sektor ekonomi yang berpotensi dan dapat menjadi pilihan adalah sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa.⁵¹

4. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi menurut Prasetyo, ia menyebutkan bahwa Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun.⁵² Sedangkan menurut Untoro menyebutkan bahwa Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan

⁵¹ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*...21.

⁵² Eko Prasetyo, P., *Fundamental Makro Ekonomi*, (Yogyakarta : Beta Offset, 2009), 237.

barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang.⁵³

Pertumbuhan ekonomi menurut Arsyad diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.⁵⁴ Dan menurut Sukirno menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.⁵⁵

Menurut Rahardjo Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.⁵⁶

Berdasarkan berbagai teori pertumbuhan ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana adanya perubahan yang terjadi secara terus menerus dalam usaha untuk menaikkan pendapatan riil perkapita dan harus berlangsung dalam jangka panjang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

⁵³ Joko Untoro, *Ekonomi*, (Jakarta: Kawah Media, 2010), 39.

⁵⁴ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010), 12.

⁵⁵ Sukirno Sadono, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 9.

⁵⁶ Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*, (Yogyakarta: cetakan pertama, Graha Ilmu, 2013), 4.

Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

b. Faktor Utama Dalam Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Arsyad, bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu sebagai berikut :

1) Akumulasi Modal

Akumulasi modal adalah seluruh investasi baru yang masuk berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal dan sumber daya manusia, akan terjadi bila ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan selanjutnya diinvestasikan yang bertujuan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Akumulasi modal akan menambah sumber daya baru dan meningkatkan sumber daya yang telah ada.

2) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan seluruh hal yang berkaitan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja dianggap sebagai faktor positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi, namun kemampuan tersebut tergantung pada kemampuan sistem ekonomi yang berlaku dalam menyerap dan memperkerjakan tenaga kerja secara produktif.

3) Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi adalah faktor yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana,

kemajuan teknologi dipengaruhi oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang dibenahi dalam melakukan pekerjaan tradisional.⁵⁷

c. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Menurut Rahardjo dalam bukunya, bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:⁵⁸

1) Ketidakseimbangan Pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

2) Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri

⁵⁷ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan...*270.

⁵⁸ Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan...*91.

akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

3) Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis *financial* Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

4) Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya).

5) Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak

penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB , kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen pendapatan ini menurut sektor disebut Nilai Tambah Bruto (NTB sektoral). Jadi, PDRB yang dimaksud adalah jumlah dari NTB seluruh sektor lapangan usaha. Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian perhitungan berdasarkan harga konstan maka perkembangan riil dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi riil dapat dihitung.

d. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Bruto didasarkan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku adalah produk domestik bruto total yang nilai berdasarkan harga-

harga sekarang (harga yang sedang berlaku).⁵⁹ Sedangkan produk domestik bruto atas harga konstans harus ditentukan tahun dasar terlebih dahulu, yaitu tahun ketika perekonomian berada dalam kondisi baik sehingga harga-harga tetap stabil atau konstan. Penghitungan produk regional bruto dengan didasarkan atas harga berlaku dapat dirumuskan sebagai berikut:⁶⁰

$$Growth = \frac{PDRBs - PDRBk}{PDRBk} \times 100\%$$

Growth = Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah

PDRBs = PDRB riil tahun sekarang

PDRBk = PDRB riil tahun kemarin

e. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia. Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Dalam perspektif islam menyatakan bahwa semua disediakan oleh Allah untuk

⁵⁹ Tri Kunawaningsih dan Antyo Pracoyo, *Aspek dasar ekonomi Makro Di Indonesia*. (Jakarta : Grasindo, 2005), 49.

⁶⁰ Imamul Arifin, *Membukan Cakrawala Ekonomi*, (Bandung : Grafindo, 2007), 97

memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.⁶¹

Pertumbuhan Ekonomi telah digambarkan dalam QS. Nuh ayat 10-12:⁶²

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢)

*Artinya: 10. maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, 11. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, 12. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.(QS. Nuh ayat 10-12)*⁶³

Dijelaskan pula dalam firman Allah Q.S Al-A'raf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٦)

*Artinya: 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al-A'raf ayat 96)*⁶⁴

⁶¹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, 2015), 124.

⁶² *Ibid*, 139.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,...

⁶⁴ *Ibid*,...

Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istighfar (minta ampun). Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada tuhan, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan.

B. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang penulis fahami, penelitian yang mencoba mengangkat tema Pengaruh *Financial Inclusion* terhadap pertumbuhan ekonomi masih jarang dilakukan. Yang sering penulis temukan adalah tema terkait dengan Pengaruh *Financial Inclusion* terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan pengukuran dan penentuan determinasi pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan. Penulis juga akan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan tema yang akan diangkat.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kustika Ningrum yang bertujuan untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Timur periode tahun 2011-2015. Ia menggunakan objek penelitian seluruh daerah di Jawa Timur yaitu 38 kabupaten/kota dalam kurun waktu lima tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah perhitungan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) atau Index of

Financial Inclusion (IFI) dan regresi linier sederhana. Hasil penelitian adalah secara umum provinsi Jawa Timur dapat dikatakan tingkat inklusi keuangannya tergolong baik. Hal ini didukung kebijakan pemerintah yang memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor jasa keuangan yang kontributif, stabil dan inklusif. Inklusi keuangan secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.⁶⁵

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hanna 'Ulyauz Zakiyyah yang berfokus pada analisa pengaruh pembiayaan mikro yang dikeluarkan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menggunakan tiga variabel indikator yaitu perbankan syariah, perkembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan mikro yang dikeluarkan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengaruh tersebut baik yang bersifat langsung antara variabel perbankan syariah dengan variabel pertumbuhan ekonomi, maupun pengaruh tidak langsung antara variabel perbankan syariah, perkembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi.⁶⁶

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hedwigis Esti Riwayati yang menganalisis keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dimediasi oleh inklusi keuangan. Objek penelitiannya adalah pelaku usaha kecil dan menengah, pengrajin batu di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitiannya adalah data primer yang diperoleh

⁶⁵ Dewi Kustika Ningrum, *Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Ketimpangan Di Jawa Timur Periode Tahun 2011- 2015..*

⁶⁶ Hanna 'Ulyauz Zakiyyah , *Pengaruh Pembiayaan Mikro Perbankan Syariah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, ..*

dari penyebaran kuesioner kepada 76 pengrajin batu dengan menggunakan program Partial Least Square (PLS) sebagai alat pengolah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor internal dan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pengrajin batu di Kabupaten Magelang, dan Inklusi keuangan mampu memediasi penentu keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.⁶⁷

Penelitian berikutnya dilakukan oleh M. Andi Prayogi dan Lukman H. Siregar yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha UKM Pada PT. BRI Syariah Cabang Medan. Data yang digunakan dalam penelitiannya adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 40 orang nasabah dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mikro syariah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah PT. BRI Syariah Cabang Medan.⁶⁸

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siswati Rachman yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kuantitas tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi UKM sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Teknik analisis data menggunakan teknik kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial (*Multiple Regression*). Hasil

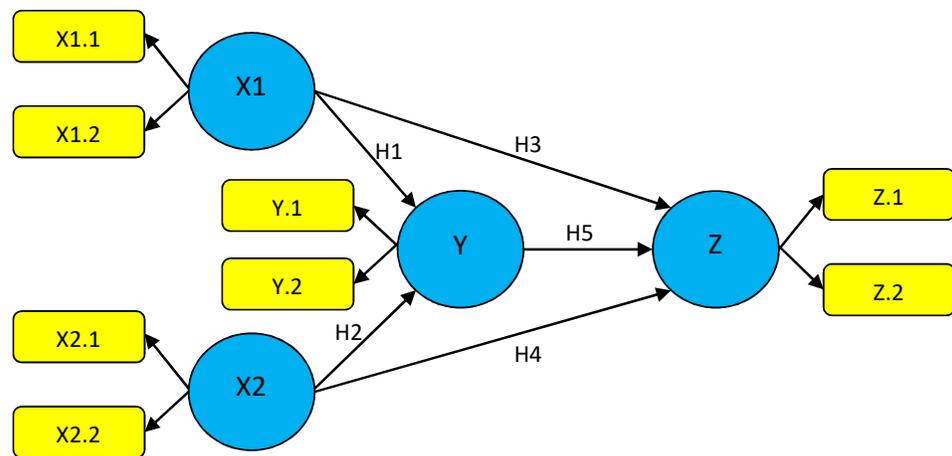
⁶⁷ Hedwigis Esti Riwayati, *Financial Inclusion of Business Players in Mediating the Success of Small and Medium Enterprises in Indonesia*, (International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.7, No.4, 2017), 623-627.

⁶⁸ Andi Prayogi dan Lukman H. Siregar, *Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah*,, 121-131.

penelitian menunjukkan bahwa variabel yang merupakan indikator dari pengembangan usaha kecil dan menengah sektor manufaktur (industri kecil) yang terdiri atas tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.⁶⁹

C. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini ditunjukkan sebagai gambar berikut:



Gambar 2.3.
Kerangka Konseptual

Secara garis besar variabel yang ada dalam penelitian ini adalah seperti tabel di bawah ini dengan masing-masing variabel memiliki indikator dan hubungan masing-masing sesuai hipotesa awal.

⁶⁹ Siswati Rachman, *Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Manufaktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar*, 71-82.

Tabel 2.2. Variabel dan Indikator Kerangka Konseptual

Variabel	Kode	Keterangan
Variabel Laten	X1	Financial Inclusion
Indikator	X1.1	Indikator Financial Inclusion Konvensional
	X1.2	Indikator Financial Inclusion Syariah
Variabel Laten	X2	Pembiayaan Perbankan Syariah
Indikator	X2.1	Pembiayaan Modal Kerja
	X2.2	Pembiayaan Investasi
Variabel Laten	Y	Perkembangan UMKM
Indikator	Y.1	Tenaga Kerja UMKM
	Y.2	Ekspor Non Migas
Variabel Laten	Z	Pertumbuhan Ekonomi
Indikator	Z.1	PDRB provinsi
	Z.2	Ekspor Migas dan Non Migas